

## Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Studi Pada : BPKAD Kabupaten Dompu)

Suharni<sup>1✉</sup>, Muh Syahru Ramadhan<sup>2</sup>, Asmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Dompu, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan anggaran, motif politik, pengawasan internal dan audit, serta kompetensi sumber daya manusia terhadap praktik manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Studi ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 40 responden yang dipilih secara purposive. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran berpengaruh signifikan terhadap praktik manipulasi akrual, sedangkan motif politik, pengawasan internal, dan kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan birokratis lebih mendorong praktik manipulasi akrual dibandingkan faktor lainnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian model konseptual yang mengintegrasikan unsur politik dan kompetensi SDM dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang belum banyak diteliti secara empiris sebelumnya.

**Kata Kunci:** Tekanan Anggaran, Motif Politik, Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Manipulasi Akrual.

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of budget pressure, political motives, internal and audit oversight, and human resource competence on accrual manipulation practices in local government financial reporting. The research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Dompu Regency using a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to 40 purposively selected respondents. The analysis employed multiple linear regression, preceded by validity, reliability, and classical assumption tests. The results reveal that budget pressure has a significant effect on accrual manipulation, while political motives, internal control, and HR competence do not show significant influence. These findings suggest that bureaucratic pressure plays a more dominant role in driving accrual manipulation than other variables. The novelty of this study lies in its empirical testing of a conceptual model that integrates political and human resource factors in the context of government financial reporting, which has received limited attention in prior research.*

**Keywords:** budget pressure, political motives, internal control, HR competence, accrual manipulation.

Copyright (c) 2025 Suharni

✉ Corresponding author :

Email Address : [syahru260113@gmail.com](mailto:syahru260113@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui laporan keuangan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2018), merujuk pada kewajiban institusi publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat yang menjadi sumber utama dana tersebut. Transparansi, di sisi lain, menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menilai aktivitas keuangan pemerintah secara objektif (Mahmudi, 2019). Oleh sebab itu, pelaporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menjadi sarana administrasi, tetapi juga menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Di Indonesia, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah diatur secara sistematis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPKAD, sebagai unit pelaksana teknis, memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP. Laporan ini digunakan sebagai dasar evaluasi oleh BPK dan BPKP, sesuai amanat Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017. Dalam konteks Kabupaten Dompu, BPKAD bertugas tidak hanya sebagai penyusun laporan, tetapi juga sebagai perencana, pengelola, dan pengawas anggaran daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan fungsi ini sangat menentukan kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan anggaran. Tekanan ini terjadi ketika anggaran daerah tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat. Berdasarkan teori *Resource Dependency* (Pfeffer & Salancik, 1978), dalam kondisi ketergantungan terhadap sumber daya terbatas, organisasi akan berusaha menyesuaikan strategi mereka agar tetap dapat bertahan. Johnson dan Libby (2002) menyatakan bahwa tekanan anggaran dapat mendorong manajemen meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, tetapi Smith (2010) menunjukkan bahwa kondisi yang sama dapat pula mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan demi mempertahankan citra dan memenuhi target anggaran.

Selain tekanan anggaran, motif politik turut memainkan peran signifikan dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan. Dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) mengandung risiko konflik kepentingan. Agen dapat terdorong untuk membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya, bukan kepentingan masyarakat luas. Studi oleh Alesina dan Tabellini (2007) mengungkapkan bahwa pemimpin yang memiliki motif politik cenderung mengalokasikan anggaran pada proyek-proyek yang populis, terutama menjelang pemilu. Sebaliknya, Ferejohn (1986) menunjukkan bahwa pemimpin yang mengedepankan orientasi jangka panjang akan lebih rasional dalam pengelolaan anggaran, meskipun menghadapi tekanan politik.

Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah efektivitas pengawasan internal dan audit. Sistem pengendalian internal yang kuat dan berintegritas dapat mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) mengidentifikasi lima komponen utama pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Cohen et al. (2007) menunjukkan bahwa pengawasan internal yang efektif dapat meningkatkan akurasi dan integritas pelaporan keuangan. Namun, Beasley et al. (2000) mengingatkan bahwa pengawasan hanya akan efektif jika didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan transparansi.

Kompetensi sumber daya manusia juga berperan sentral dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Teori kompetensi yang dikembangkan oleh Spencer & Spencer (1993) menyebutkan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan atribut pribadi. Dalam konteks sektor publik, aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu memahami regulasi, mengimplementasikan sistem akuntansi, dan menyajikan laporan keuangan yang benar. Salas et al. (2012) menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pegawai dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, sedangkan McBer and Company (2000) menyatakan bahwa kelemahan dalam kompetensi berisiko menyebabkan kesalahan fatal dalam penyusunan laporan keuangan.

Salah satu bentuk penyimpangan yang marak terjadi dalam pelaporan keuangan adalah praktik manipulasi akruaI, yaitu upaya sistematis untuk mengubah catatan akuntansi agar mencerminkan performa keuangan yang lebih baik dari kenyataan. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mempercepat pengakuan pendapatan, menunda pencatatan beban, atau mencatat transaksi fiktif. Healy dan Wahlen (1999) menyebut manipulasi akruaI sebagai bentuk intervensi terhadap proses pelaporan keuangan yang dapat merusak kualitas informasi dan menyesatkan pengambilan keputusan. Penelitian oleh Jdan Dechow et al. (1996) mengungkapkan bahwa insentif politik, tekanan anggaran, serta lemahnya pengawasan dapat menjadi pemicu utama praktik manipulatif ini.

Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akruaI yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Bastian, 2020), studi oleh Christensen et al. (2021) menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam sistem akruaI justru memberikan ruang bagi praktik manipulasi akruaI. Basis akruaI memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan waktu terjadinya transaksi, bukan hanya pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sehingga membuka peluang rekayasa yang sulit terdeteksi oleh pihak eksternal.

Kabupaten Dompu merupakan salah satu wilayah otonom yang mengalami tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa tahun terakhir, BPKAD Dompu menghadapi persoalan serius, mulai dari inkonsistensi dalam penerapan akuntansi akruaI hingga persoalan pengelolaan aset yang belum optimal. BPS Dompu (2022) mencatat bahwa struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor pertanian dan peternakan menyebabkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, sehingga tekanan anggaran menjadi isu permanen. Selain itu, laporan investigasi oleh media lokal dan hasil audit BPKP (2021) mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam penganggaran, termasuk dalam belanja pegawai dan barang/jasa di enam OPD. Aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Dompu pada tahun 2022 juga memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam realisasi anggaran sebesar Rp4 miliar, serta polemik terkait pengelolaan aset daerah seperti kendaraan dinas yang rusak atau hilang (Topikbidom.com; Tamboraspot.com).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan yang mendesak untuk mencegah dan menanggulangi praktik manipulasi akruaI dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Praktik ini tidak hanya merusak kualitas informasi publik, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebijakan fiskal yang berdampak luas bagi masyarakat. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab manipulasi akruaI secara komprehensif, serta mengembangkan model konseptual yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya.

Penelitian ini menggabungkan teori agensi dan teori akuntabilitas publik sebagai kerangka berpikir dalam meneliti pengaruh tekanan anggaran, motif politik, pengawasan internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap praktik manipulasi akruaI. Tidak seperti penelitian sebelumnya (Trisnawati & Suryandari, 2020) yang cenderung hanya menelaah sebagian faktor, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual dengan studi kasus pada BPKAD Kabupaten Dompu. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan

yang praktis dan relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara menyeluruh.

## **METODOLOGI**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasional untuk menganalisis hubungan antara tekanan anggaran, motivasi politik, pengawasan internal, dan kompetensi SDM dengan praktik manipulasi akruaI di BPKAD Kabupaten Dompu. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur pengaruh antar variabel secara objektif melalui data numerik (Ghozali, 2020).

### **Populasi dan Sampel**

#### **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat dan staf BPKAD Kabupaten Dompu yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepala, bendahara, serta staf penyusun anggaran dan laporan keuangan, dengan jumlah total 53 orang.

#### **Sampel**

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu agar relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Sampel terdiri dari 40 responden yang merupakan pejabat dan staf di BPKAD Kabupaten Dompu yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah. Pemilihan ini memastikan responden memiliki kualifikasi yang tepat untuk memberikan informasi akurat terkait praktik manipulasi akruaI. Teknik ini dinilai efektif dalam penelitian sosial karena meningkatkan validitas dan relevansi data yang diperoleh.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Data Primer**

Data utama penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada individu yang telah dipilih. Tekanan anggaran, motif politik, pengawasan internal, dan kompetensi sumber daya manusia adalah beberapa variabel penelitian yang diukur melalui kuesioner yang dirancang dengan cermat.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, yang terdiri dari laporan keuangan, catatan audit, dan laporan tahunan.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis statistik deskriptif**

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam analisis ini, data dijelaskan dengan menggunakan ukuran statistik seperti rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), nilai maksimum, dan nilai minimum, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik sampel penelitian (Sugiyono, 2017).

#### **Uji Keabsahan data**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian (kuisisioner) mampu mengukur variabel yang ingin diteliti secara akurat. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa setiap item dalam kuisisioner benar-benar dapat merepresentasikan aspek

yang sedang diteliti. Validitas diuji dengan mengkorelasikan skor masing-masing indikator dengan total skor dari variabel yang bersangkutan.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk menilai konsistensi jawaban dalam kuisioner, yaitu apakah hasil yang diperoleh tetap stabil jika pengukuran dilakukan berulang kali. Pengujian reliabilitas ini dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha. Pada setiap variabel, reliabilitas dianggap terpenuhi jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60, yang berarti instrumen penelitian dapat diandalkan.

### Uji Asumsi Klasik

#### Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal, maka model regresi yang digunakan dapat dianggap baik dan memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2020). Salah satu metode yang digunakan untuk menguji normalitas dalam model regresi adalah Kolmogorov-Smirnov Test.

#### Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (bebas) atau tidak. Jika terjadi korelasi maka dapat dikatakan terkena gejala multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel - variabel independen. Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan uji VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Jika perhitungan nilai VIF di bawah 10% dan tolerance variabel bebas di atas 10% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2020).

#### Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2020).

### Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen tekanan anggaran, motif politik, pengawasan internal, dan kompetensi SDM dan variabel dependen praktik manipulasi akruaI dalam pelaporan keuangan. Formula yang digunakan untuk analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = B + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Praktik Manipulasi AkruaI

X1 = Tekanan Anggaran

X2 = Motif Politik

X3 = Pengawasan Internal

X4 = Kompetensi SDM

B = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi

e = epsilon

#### Uji T

Untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi model masing-masing, metode statistik yang digunakan adalah uji T. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada

variabel independen tertentu yang memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Uji F**

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model regresi secara keseluruhan adalah uji F. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah setidaknya satu dari variabel independen dalam model memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Uji koefisien determinasi (R2)**

Koefisien determinasi (R2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2020).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Uji keabsahan data**

**Analisis statistic deskriptif**

**Tabel 1.** Hasil uji statistik deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tekanan Anggaran (X1)	40	14.00	50.00	37.3500	8.42021
Motif Politik ( X2)	40	25.00	50.00	39.4250	6.04635
Pengawasan internal dan audit (X3)	40	10.00	50.00	39.1500	7.02213
Kompetensi SDM (X4)	40	10.00	43.00	34.1000	6.67487
Praktik manipulasi akruaI (Y)	40	20.00	49.00	38.4500	7.13586
Valid N (listwise)	40				

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 1, variabel Tekanan Anggaran (X1) memiliki rata-rata 37,35 dengan standar deviasi 8,42, menunjukkan bahwa tekanan anggaran dirasakan cukup tinggi dengan persepsi responden yang bervariasi. Motif Politik (X2) memiliki rata-rata 39,43 dan standar deviasi 6,05, yang mengindikasikan pengaruh motif politik tergolong tinggi dengan keragaman tanggapan. Pengawasan Internal dan Audit (X3) memiliki rata-rata 39,15 dan standar deviasi 7,02, menandakan bahwa pengawasan dinilai baik dengan persepsi yang cukup beragam. Kompetensi SDM (X4) menunjukkan rata-rata 34,10 dan standar deviasi 6,67, yang mencerminkan penilaian baik terhadap kualitas SDM. Sementara itu, Praktik Manipulasi AkruaI (Y) memiliki rata-rata 38,45 dengan standar deviasi 7,14, yang menunjukkan kecenderungan persepsi tinggi terhadap potensi manipulasi akruaI dengan tingkat variasi yang cukup besar.

**Uji Validitas**

**Tabel 2.** Hasil uji validitas

Variable	Indikator	r hitung	r tabel	Signivikan	A	Keterangan
Tekanan Anggaran (X1)	X1.1	0,705	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,799	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,696	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,650	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,769	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.6	0,699	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.7	0,611	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.8	0,672	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X1.9	0,779	0,3120	0,000	0,05	Valid

Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manipulasi Akrual....

	X1.10	0,748	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.1	0,643	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,638	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,641	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,625	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,682	0,3120	0,000	0,05	Valid
Motif Politik (X2)	X2.6	0,558	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.7	0,671	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.8	0,564	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.9	0,541	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X2.10	0,518	0,3120	0,001	0,05	Valid
	X3.1	0,695	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.2	0,718	0,3120	0,000	0,05	Valid
Pengawasan Internal Dan Audit (X3)	X3.3	0,613	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.4	0,728	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.5	0,602	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.6	0,676	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.7	0,654	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.8	0,544	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.9	0,591	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X3.10	0,631	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.1	0,746	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.2	0,748	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.3	0,481	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.4	0,623	0,3120	0,000	0,05	Valid
Kompetensi SDM (X4)	X4.5	0,615	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.6	0,732	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.7	0,484	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.8	0,469	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.9	0,486	0,3120	0,000	0,05	Valid
	X4.10	0,545	0,3120	0,000	0,05	Valid
Praktik Manipulasi Akrual (Y)	Y.1	0,613	0,3120	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,559	0,3120	0,000	0,05	Valid
	Y.3	0,713	0,3120	0,001	0,05	Valid
	Y.4	0,710	0,3120	0,000	0,05	Valid
	Y.5	0,736	0,3120	0,000	0,05	Valid
	Y.6	0,682	0,3120	0,000	0,05	Valid
	Y.7	0,722	0,3120	0,001	0,05	Valid
	Y.8	0,757	0,3120	0,000	0,05	Valid
	Y.9	0,424	0,3120	0,000	0,05	Valid
	Y.10	0,454	0,3120	0,001	0,05	Valid

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas table 2, diatas menunjukan bahwa semua instrument pernyataan dari Tekanan Anggaran (X1), Motif Politik (X2), Pengawasan internal dan audit (X3), Kompetensi SDM (X4), dan Praktik manipulasi akrual (Y), mempunyai nilai r hitung > 0,3120 nilai dari r tabel dan nilai signifikan < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua instrument pernyataan sudah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Tekanan Anggaran (X1)	0,892	0,60	Reliabel
Motif Politik (X2)	0,812	0,60	Reliabel
Pengawasan internal dan audit (X3)	0,840	0,60	Reliabel

Kompetensi SDM (X4),	0,801	0,60	Reliabel
Praktik manipulasi akruaal (Y)	0,842	0,60	Reliabel

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 3, hasil uji reliabilitas variabel Tekanan Anggaran (X1), Motif Politik (X2), Pengawasan internal dan audit (X3), Kompetensi SDM (X4), dan Praktik manipulasi akruaal (Y), memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60, yaitu lebih besar dari standar yang di gunakan dalam penelitian in yaitu 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**Tabel 4.** Hasil Uji Normslitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.73350215	
Most Extreme Differences	Absolute	.103	
	Positive	.103	
	Negative	-.090	
Kolmogorov-Smirnov Z		.651	
Asymp. Sig. (2-tailed)			.790

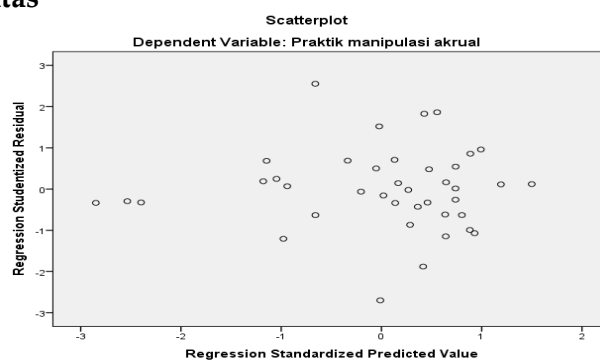
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4 diatas yaitu tabel hasil uji normalita diperoleh nilai signifikansi dari keseluruhan variabel yaitu 0,710 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tekanan Anggaran (X1), Motif Politik (X2), Pengawasan internal dan audit (X3), Kompetensi SDM (X4), dan Praktik manipulasi akruaal (Y), berdistribusi normal.

**Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 2.** Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan gambar 2, diatas terlihat tidak terdapat pola tertentu dan titik tidak menggumpal diatas atau dibawah saja, atau titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5.** Hasil Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tekanan Anggaran (X1)	0,476	2.102
Motif Politik (X2)	0,412	2.430
Kompetensi SDM (X4)	0,509	1.963
Pengawasan internal dan audit (X3)	0,825	1.213

a. Dependent Variable: Praktik manipulasi akruaI (Y)

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Bersasarkan table 5, diatas hasil uji multikolinearitas menunjukan bahwa variabel Tekanan Anggaran (X1), Motif Politik (X2), Pengawasan internal dan audit (X3), serta Kompetensi SDM (X4), memiliki nilai nilai VIF ≤10 dan Tolerance ≥ 0,10, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

**Uji Hipotesis  
Regresi Linear Berganda**

**Tabel 6.** Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	6.219	4.636
	Tekanan Anggaran (X1)	.570	.109
	Motif Politik (X2)	.295	.163
	Pengawasan internal dan audit (X3)	-.011	.126
	Kompetensi SDM (X4)	-.007	.104

a. Dependent Variable: Praktik manipulasi akruaI (Y)

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

$$Y = 6,219 + 0,570X1 + 0,295X2 - 0,011X3 - 0,007X4$$

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstan positif sebesar 6,219, artinya jika Tekanan Anggaran (X1), Motif Politik (X2), Pengawasan internal dan audit (X3), serta Kompetensi SDM (X4) bernilai 0 maka, Praktik manipulasi akruaI (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 6,219.
2. Variabel Tekanan Anggaran (X1) memiliki nilai koefisien (b) positif sebesar 0,570, yang artinya jika Variabel Tekanan Anggaran (X1) meningkat 1 satuan, maka Variabel Praktik manipulasi akruaI (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,570.
3. Variabel Motif Politik (X2) memiliki nilai koefisien (b) positif sebesar 0,295, artinya jika jika Variabel Motif Politik (X2) meningkat 1 satuan maka Variabel Praktik manipulasi akruaI (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,295.
4. Variabel Pengawasan internal dan audit (X3) memiliki nilai koefisien (b) negatif sebesar -0,011, artinya jika jika Variabel Pengawasan internal dan audit (X3) meningkat 1 satuan maka Variabel Praktik manipulasi akruaI (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,011.
5. Variabel Kompetensi SDM (X4) memiliki nilai koefisien (b) positif sebesar -0,07, artinya jika jika Variabel Kompetensi SDM (X4) meningkat 1 satuan maka Variabel Praktik manipulasi akruaI (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,07.

Uji T (Parsial)

**Tabel 7.** Hasil Uji t (Parsial)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		t	Sig.
1	Tekanan Anggaran (X1)	5.249	.000
	Motif Politik (X2)	1.811	.079
	Pengawasan internal dan audit (X3)	-.089	.930
	Kompetensi SDM (X4)	-.071	.944
	Kompetensi SDM (X4)	-.071	.944

a. Dependent Variable: Praktik manipulasi akruaal (Y)

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 7, diatas hasil uji t (parsial) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Tekanan Anggaran (X1) Terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y)  
Hasil nilai t hitung sebesar 5,249 > 2,02809 nilai t tabel, serta nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,000 < 0,05, artinya secara parsial Tekanan Anggaran (X1) berpengaruh terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y).
2. Pengaruh Motif Politik (X2) terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y)  
Hasil nilai t hitung sebesar 1,811 < 2,02809 nilai t tabel, serta nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,079 > 0,05, yang artinya secara parsial Motif Politik (X2) tidak berpengaruh terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y).
3. Pengaruh Pengawasan internal dan audit (X3) terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y)  
Hasil nilai t hitung sebesar -0,089 < 2,02809 nilai t tabel, serta nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,930 > 0,05, yang artinya secara parsial, Pengawasan internal dan audit (X3) tidak berpengaruh terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y).
4. Pengaruh Kompetensi SDM (X4) terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y)  
Hasil nilai t hitung sebesar 0,071 < 2,02809 nilai t tabel, serta nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,944 > 0,05, yang artinya secara parsial Kompetensi SDM (X4) tidak berpengaruh terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y).

Uji F (Simultan)

**Tabel 8.** Hasil Uji F (Simultan)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1442.278	4	360.569	23.215	.000 <sup>b</sup>
	Residual	543.622	35	15.532		
	Total	1985.900	39			

a. Dependent Variable: Praktik manipulasi akruaal (Y)

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X4), Tekanan Anggaran (X1), Pengawasan internal dan audit (X3), Motif Politik (X2)

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 8, diatas nilai F hitung sebesar 23.215 > nilai F tabel yaitu sebesar 2,87 sedangkan nilai sig. yaitu sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Tekanan Anggaran (X1), Motif Politik (X2), Pengawasan internal dan audit (X3), serta Kompetensi SDM (X4), berpengaruh terhadap Praktik manipulasi akruaal (Y).

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 9.** Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 <sup>a</sup>	.726	.695	3.941

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X4), Tekanan Anggaran (X1), Pengawasan internal dan audit (X3), Motif Politik (X2)

Sumber. Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 9, nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada kolom nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,695 atau 69,5% yang artinya bahwa variabel Tekanan Anggaran (X1), Motif Politik (X2), Pengawasan internal dan audit (X3), serta Kompetensi SDM (X4), memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi variabel Praktik manipulasi akruaI (Y) yaitu sebesar 69,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

**Pembahasan**

**Pengaruh Tekanan Anggaran (X1) terhadap Praktik Manipulasi AkruaI (Y)**

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tekanan anggaran berpengaruh signifikan terhadap praktik manipulasi akruaI. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 5,249 > 2,02809 nilai t tabel dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tekanan anggaran yang dirasakan oleh pegawai, maka semakin besar kemungkinan terjadinya praktik manipulasi akruaI dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tekanan anggaran yang dialami pegawai BPKAD Kabupaten Dompu mencakup beberapa faktor utama, antara lain: kebutuhan anggaran yang sering melebihi dana yang tersedia, tenggat waktu penyusunan laporan yang terlalu sempit, serta tekanan pimpinan untuk menunjukkan realisasi anggaran yang tepat waktu. Hal ini diperkuat oleh perasaan terbebani terhadap target realisasi anggaran tahunan serta penilaian kinerja keuangan yang hanya didasarkan pada kemampuan menyerap anggaran. Dalam situasi seperti ini, beberapa pegawai merasa terdorong untuk menyesuaikan laporan agar terlihat sesuai dengan rencana, guna menghindari sanksi atau penilaian negatif atas kinerja instansi. Bahkan, terdapat pengakuan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi anggaran memicu tindakan rekayasa dalam pelaporan, dan realisasi anggaran yang rendah dianggap sebagai kegagalan, sehingga mendorong pelaporan yang tidak sepenuhnya akurat.

Dalam perspektif teori akuntansi positif, praktik manipulasi akruaI seperti ini dapat dijelaskan melalui pendekatan oportunistik, di mana individu atau unit kerja melakukan tindakan-tindakan strategis dalam pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mempertahankan reputasi atau memenuhi target birokratis. Teori ini menyatakan bahwa aktor dalam organisasi publik akan berperilaku sesuai insentif, terutama saat terdapat asimetri informasi antara pelaksana (agent) dan pengawas (principal), serta dalam situasi tekanan atau ketidakpastian anggaran. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Prasetyo dan Susanto (2019) dalam studi mereka di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa tekanan anggaran menjadi faktor signifikan pendorong manipulasi pelaporan keuangan. Demikian pula, Nugroho dan Hidayat (2022) yang meneliti pada Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa tekanan untuk menyerap anggaran sepenuhnya mendorong terjadinya manipulasi akruaI, terutama dalam bentuk pengakuan pendapatan yang tidak tepat waktu dan pengabaian beban-beban riil.

**Pengaruh Motif Politik (X2) terhadap Praktik Manipulasi AkruaI (Y)**

Hasil analisis menunjukkan bahwa motif politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manipulasi akruaI dalam pelaporan keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,079 yang lebih besar dari ambang batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kecenderungan penggunaan pelaporan keuangan untuk mendukung agenda tertentu dalam lingkup politik, pengaruh tersebut

belum cukup kuat untuk mendorong terjadinya manipulasi akruaI secara sistematis. Dalam praktiknya, pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah kadang menjadi instrumen untuk membangun citra politis, terutama menjelang momen strategis seperti pemilu atau saat kepala daerah ingin menunjukkan keberhasilan program-program pembangunan. Ada kalanya kebijakan pelaporan disesuaikan dengan strategi politik, seperti menampilkan surplus anggaran atau menonjolkan keberhasilan penyerapan anggaran untuk memperkuat legitimasi pemerintahan. Selain itu, proses pelaporan juga berpotensi terpengaruh oleh dinamika politik, seperti pergantian pejabat atau dominasi kekuasaan kepala daerah dalam menentukan arah penyajian informasi keuangan.

Meskipun demikian, kondisi ini belum cukup menjadi pemicu utama terjadinya praktik manipulasi akruaI. Hal ini dapat disebabkan oleh kuatnya sistem teknokratis dalam penyusunan laporan, yang mengandalkan prosedur baku, penggunaan sistem informasi keuangan berbasis aturan, serta pengawasan dari lembaga auditor eksternal maupun internal. Pelaporan keuangan cenderung tetap berjalan dalam koridor profesional dan regulatif, sehingga ruang untuk intervensi politis menjadi relatif sempit. Tekanan politik yang mungkin muncul lebih banyak bersifat simbolis daripada teknis, sehingga tidak serta-merta mendorong penyesuaian dalam pengakuan pendapatan atau pembebanan biaya yang merupakan ciri utama dari manipulasi akruaI. Dalam kerangka teori legitimasi akuntansi, organisasi sektor publik memang cenderung melakukan penyesuaian untuk mempertahankan dukungan dan kepercayaan dari publik serta pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, ketika proses pelaporan telah dikawal oleh sistem yang transparan dan terstandarisasi, kemungkinan terjadinya distorsi karena kepentingan politik menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas kelembagaan dan profesionalisme akuntansi memainkan peran penting dalam meminimalisasi pengaruh politik terhadap pelaporan.

Temuan ini berbanding terbalik dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di wilayah lain. Misalnya, studi oleh Faccio, Masulis, dan McConnell (2016) menunjukkan bahwa entitas yang memiliki keterkaitan politik cenderung memanipulasi informasi keuangan untuk tujuan elektoral. Demikian pula penelitian Hasibuan dan Iskandar (2020) di Deli Serdang mengungkap adanya korelasi antara musim politik dan penyajian laporan yang lebih menguntungkan secara visual. Namun dalam konteks Kabupaten Dompu, hasil berbeda muncul, yang mengindikasikan bahwa motif politik belum menjadi faktor dominan dalam mendorong praktik manipulatif terhadap laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulastri dan Yuliani (2021) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, yang menyimpulkan bahwa motif politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manipulasi akruaI karena dominasi sistem pelaporan keuangan berbasis regulasi teknis yang ketat. Penelitian lain oleh Safitri (2022) di Pemerintah Kota Banjarmasin juga mendukung hasil serupa, yaitu bahwa meskipun tekanan politik hadir secara kontekstual, pengaruhnya terhadap praktik manipulasi akuntansi tidak cukup kuat karena keterlibatan pengawasan yang aktif dan budaya kerja yang berorientasi pada kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

### **Pengaruh Pengawasan Internal dan Audit (X3) terhadap Praktik Manipulasi AkruaI (Y)**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan internal dan audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manipulasi akruaI, dengan nilai signifikansi sebesar 0,930, jauh di atas batas signifikansi 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan pengawasan internal dan pelaksanaan audit dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak mendukung atau mendorong terjadinya manipulasi akruaI. Pelaksanaan audit internal secara berkala, keberadaan sistem pengendalian internal yang berjalan sesuai prosedur, dan tersedianya laporan hasil pengawasan yang terbuka menunjukkan bahwa pengawasan telah menjadi bagian dari mekanisme formal pengendalian organisasi. Tim pengawas juga telah menjalankan perannya secara independen dan terjadwal, serta pengawasan dilakukan secara merata di seluruh unit kerja. Meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas, seperti dalam hal penegakan sanksi atau tindak lanjut hasil

audit, secara struktur dan prinsip, sistem pengawasan yang ada tidak memberikan peluang atau dukungan terhadap perilaku manipulatif. Pengawasan internal juga telah memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai pentingnya kepatuhan terhadap sistem dan akuntabilitas pelaporan. Dalam pelaksanaan di lapangan, fungsi audit tidak digunakan untuk menjustifikasi atau membiarkan penyesuaian data akruaI yang menyimpang dari realitas. Sebaliknya, pengawasan diarahkan untuk mendeteksi penyimpangan dan memastikan bahwa pencatatan pendapatan, belanja, estimasi, maupun pemilihan metode pelaporan dilakukan sesuai ketentuan.

Berdasarkan teori sistem pengendalian internal dalam akuntansi, peran audit internal bukan hanya sebagai detektor penyimpangan, tetapi juga sebagai sistem penjamin kualitas pelaporan. Ketika sistem tersebut tidak berpengaruh terhadap praktik manipulatif, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan berjalan sebagai pengaman independen yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penyimpangan, serta tidak memiliki peran dalam memperbesar potensi terjadinya manipulasi akruaI. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitriani dan Prasetyo (2020) yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten, yang menyatakan bahwa meskipun pengawasan internal belum optimal dalam mencegah semua bentuk manipulasi, sistem ini tidak berkorelasi dengan dorongan manipulatif. Penelitian oleh Putra dan Lestari (2021) di Pemerintah Kota Madiun juga menemukan bahwa audit internal tidak digunakan sebagai alat manipulasi, karena berjalan berdasarkan regulasi dan mekanisme kendali yang telah ditetapkan, meskipun perlu peningkatan dari sisi ketegasan implementasi.

#### **Pengaruh Kompetensi SDM (X4) terhadap Praktik Manipulasi AkruaI (Y)**

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel kompetensi sumber daya manusia tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap praktik manipulasi akruaI, dengan nilai signifikansi sebesar 0,944, jauh di atas batas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang dimiliki aparaturnya pemerintah tidak berkaitan atau tidak mendukung terjadinya manipulasi akruaI dalam pelaporan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan telah dibekali dengan pemahaman yang memadai terhadap standar akuntansi pemerintahan, memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan publik, serta menunjukkan penguasaan terhadap sistem pelaporan dan prosedur teknis akuntansi. Mereka juga memahami peran penting laporan keuangan dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel. Fakta bahwa kompetensi ini tidak berkontribusi terhadap praktik manipulatif menegaskan bahwa pengetahuan, keterampilan teknis, dan profesionalisme yang dimiliki para pegawai justru berjalan selaras dengan upaya menjaga kualitas dan kejujuran laporan keuangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun masih terdapat celah terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan, kompetensi pegawai bukan merupakan faktor yang mendorong atau memungkinkan terjadinya manipulasi akruaI. Sebaliknya, kompetensi yang dimiliki bersifat netral atau bahkan cenderung menjadi kekuatan positif dalam menjaga keandalan informasi keuangan, selama dikelola dalam budaya organisasi yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis yang kuat justru dapat menjadi penghalang bagi praktik manipulatif, apabila dibarengi dengan nilai profesionalisme yang terinternalisasi dengan baik.

Dalam kerangka teori sumber daya akuntansi, kualitas individu dalam organisasi publik berperan sebagai aset yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan. Namun, ketika kompetensi tersebut tidak mempengaruhi praktik manipulasi, dapat dipahami bahwa SDM yang berkualitas justru tidak digunakan sebagai instrumen penyimpangan, dan secara struktural tidak mendorong terjadinya rekayasa akruaI. Kompetensi berdiri sebagai bagian dari sistem pengaman profesional yang bekerja sesuai regulasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Soejatmiko dan Ariani (2021) di Pemerintah Kota Depok yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat kompetensi pegawai cukup tinggi, hal itu tidak berkaitan dengan praktik manipulatif, karena proses pelaporan tetap dikendalikan oleh sistem dan nilai-nilai organisasi yang menolak penyimpangan. Penelitian lain oleh Yulinda dan Rachmawati (2022) di Pemerintah Kabupaten Sleman juga

mengonfirmasi bahwa kompetensi individu bukanlah pendorong manipulasi, bahkan dalam lingkungan kerja yang memiliki tekanan politik dan administratif.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manipulasi akrual pada pelaporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu. Pegawai cenderung menyesuaikan pelaporan keuangan dalam situasi beban realisasi anggaran yang tinggi, keterbatasan alokasi dana, serta tekanan waktu dan pencapaian target, sehingga pelaporan menjadi alat penyeimbang antara realisasi dan rencana anggaran. Temuan ini sejalan dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa individu dalam organisasi publik dapat menunjukkan perilaku oportunistik ketika menghadapi tekanan birokratis dan ketidakseimbangan informasi. Sebaliknya, motif politik, pengawasan internal, dan kompetensi sumber daya manusia tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap praktik manipulasi akrual. Kuatnya sistem teknokratis, prosedur kerja yang baku, dan pengawasan yang ketat di BPKAD Dompu membatasi ruang intervensi politik. Sementara itu, pengawasan dan audit yang bersifat administratif belum optimal sebagai pengendali aktif, meskipun tidak memberi celah terbuka bagi penyimpangan. Kompetensi pegawai yang tinggi justru mendukung kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, bukan mendorong manipulasi. Oleh karena itu, disarankan agar sistem penganggaran daerah dievaluasi agar lebih realistis dan fleksibel guna mengurangi tekanan berlebih; integritas sistem pelaporan perlu dijaga dari intervensi politik melalui transparansi dan sistem informasi berbasis regulasi; fungsi pengawasan harus dioptimalkan melalui peningkatan kapabilitas auditor dan penegakan sanksi; pengembangan SDM harus menyasar penguatan etika kerja dan budaya profesional; serta penelitian lanjutan perlu mengkaji variabel lain seperti budaya organisasi, integritas individu, serta sistem insentif dan pengakuan kinerja yang mungkin turut memengaruhi praktik manipulasi akrual di sektor publik.

## Referensi :

- Alesina, A., & Tabellini, G. (2007). Bureaucrats or Politicians? Part I: A Single Policy Task. *American Economic Review*, 97(1), 169-179.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapedes, P. D. (2000). Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms. *Accounting Horizons*, 14(4), 441-454.
- Christensen, H. B., Newberry, K. J., & Reck, J. L. (2021). Accrual Accounting and Government Budgeting: Evidence from the U.S. States. *Journal of Accounting and Economics*, 71(1), 101390.
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2007). Corporate Governance and the Audit Process. *Contemporary Accounting Research*, 24(3), 869-910.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1-36.
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2016). Political Connections and Corporate Bailouts. *Journal of Finance*, 61(6), 2597-2635.
- Ferejohn, J. (1986). Incumbent Performance and Electoral Control. *Public Choice*, 50(1-3), 5-25.

- Fitriani, I., & Prasetyo, H. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Manipulasi Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 112-121.
- Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, M., & Iskandar, D. (2020). Motif Politik dan Manipulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 75-86.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365-383.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Johnson, R. A., & Libby, D. (2002). Budgetary Pressure and Earnings Management: Evidence from Government Organizations. *The Accounting Review*, 77(Supplement), 193-213.
- Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- McBer and Company. (2000). Competency-Based Performance Management. New York: McBer Group.
- Nugroho, Y. S., & Hidayat, R. (2022). Tekanan Anggaran dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 45-59.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper & Row.
- Prasetyo, W., & Susanto, A. (2019). Determinasi Tekanan Anggaran terhadap Praktik Manipulasi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(2), 134-146.
- Putra, D. P., & Lestari, S. (2021). Audit Internal dan Manipulasi Akuntansi: Studi Kasus Pemerintah Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 5(1), 33-41.
- Safitri, N. (2022). Pengaruh Tekanan Politik terhadap Manipulasi Akuntansi di Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Audit*, 9(1), 17-29.
- Salas, E., Tannenbaum, S. I., Kraiger, K., & Smith-Jentsch, K. A. (2012). The Science of Training and Development in Organizations: What Matters in Practice. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(2), 74-101.
- Smith, M. (2010). Research Methods in Accounting. London: SAGE Publications.
- Soejatmiko, S., & Ariani, T. (2021). Kompetensi SDM dan Manipulasi AkruaI di Pemerintah Kota Depok. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 4(2), 97-108.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N., & Yuliani, D. (2021). Motif Politik dan Manipulasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntabilitas dan Keuangan Daerah*, 6(2), 112-124.
- Trisnawati, E., & Suryandari, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manipulasi AkruaI di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 45-59.
- Yulinda, D., & Rachmawati, T. (2022). Pengaruh Kompetensi Terhadap Praktik Manipulasi Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sleman. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik*, 8(1), 65-78.